

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhananhu wata'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Educare Volume II, Nomor 1, Agustus 2003, dapat terbit dengan melakukan jadwal penerbitan yang semula terbit per-triwulan menjadi terbitan per-semester, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas, sehingga dengan waktu yang memadai para penulis khususnya penulis pemula memiliki waktu untuk melakukan refleksi dan kontemplasi terhadap suatu masalah secara lebih mendalam. Bahkan bagi penulis yunior dari kalangan dosen muda dan mahasiswa Educare mengupayakan adanya agenda dialog gagasan terhadap berbagai topik dan nuansa yang berkembang berkaitan dengan masalah pendidikan dan kebudayaan secara berkala dan berkelanjutan.

Makna penting kehadiran Educare, bagi kita semua diharapkan menjadi media untuk membangun wacana publik yang sehat dan kritis bagi kemajuan dunia pendidikan. Meski kita sadari masalah pendidikan cukup hanya untuk didiskusikan sebagai wacana yang menarik kemudian dilupakan. Semoga Jurnal ini dapat membangun komitmen dan inspirasi baru yang lebih baik bagi kemajuan dunia pendidikan.

Karena harus kita sadari bahwa dalam atmospere global saat ini kebijakan dan implementasi pendidikan jika masih mempertahankan nilai-nilai esoterik (hanya dipahami dirinya), miopik (pandangan sempit) adalah hal yang tidak tepat. idealnya dunia pendidikan siap untuk membangun sinergi dengan segenap potensi yang lain dalam upaya mewujudkan penyempurnaan yang berkelanjutan.

Educere merespon positif adanya regulasi baru bidang pendidikan yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional, semoga regulasi baru tersebut dapat membawa warna dan dinamika baru dalam bidang pendidikan secara fundamental kearah yang lebih baik.

Masukan dan kritik yang konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan Educare sangat kami nantikan. Selamat membaca

Refleksi Pendidikan di Indonesia

Oleh : Muhammad Ridlo `Eisy
(Dewan Redaksi Pikiran Rakyat)

Pendidikan semacam apakah yang dilakukan di Indonesia, kok hasilnya seperti ini. Indonesia amburadul, dan nyaris tanpa harapan perbaikan?

Apa yang dididikkan di SD, SMP, SMU, Perguruan Tinggi, madrasah, pesantren, kok begitu banyak koruptor di Indonesia? Bahkan begitu lihai para koruptor itu, sehingga nyaris tak seorangpun koruptor yang bisa ditangkap dan dipenjara.

Muncul sinisnya, kalau mau jadi koruptor besar yang tidak bisa ditangkap, sekolah lah dengan baik.

Apa yang dididkan di Madrasah, Pesantren, Mesjid, Gereja, dan tempat-tempat ibadah yang lain, sehingga kebathilan merajalela, dan kebenaran sulit sekali muncul ?

Apa yang dididikkan pada "AKABRI" sehingga terjadi pelanggaran HAM di Timor-Timur dan ACEH bergolak? Timor Timur lepas dari Indonesia, dan negara terpaksa mengeluarkan dana yang besar untuk menumpas gerakan separatis di ACEH.

Apa yang dididkan dalam pendidikan Indonesia, mengapa daya saing sumber daya manusia Indonesia lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Korea ?

Pertanyaan di sekitar output dan outcome pendidikan Indonesia akan bisa diperpanjang setebal buku. Namun salah satu cara menilai kebijakan dan aplikasi pendidikan adalah dengan cara melihat keadaan Indonesia, sebagai output dan outcome pendidikan.

Apakah mungkin kita memanen padi , jika yang di tanam alang-alang? Apakah mungkin kita memanen padi dengan baik, apabila tidak dirawat dengan baik, tidak di pupuk, dan tidak dilindungi dari hama ?

(Refleksi yang disampaikan dalam Seminar Pendidikan, yang diselenggarakan oleh BEM FKIP UNLA, 8 Mei 2003)

Educare Vol. 2, No.1, Agustus 2003

Daftar isi :

Peradaban Global dan Peran Agama <i>Oleh : Eki Baihaki</i> _____	1
Pentingnya Pendidikan Wirausaha Koperasi Dalam Upaya Mengembangkan Koperasi <i>Oleh : Hj. Uus Manzilatusifa</i> _____	9
Pemahaman Struktur Teks Bacaan IPA dan Strategi Memahami Materialnya : Suatu Langkah ke arah “Learn How To Learn” <i>Oleh : Taufik Rahman dan Tomo</i> _____	20
Kontribusi Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi <i>Oleh : H. Asep Hidayat</i> _____	31
Asesmen Proses <i>oleh : Mumun Syaban</i> _____	42
Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Matematika <i>Oleh : H. Erman Suherman</i>	
Suplemen :	
Khasanah Intelektual Muslim : Ibn Khaldun_____	57
UU No. 20 tahun 2003. tentang SISDIKNAS_____	61

Kontribusi Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : H. Asep Hidayat

Kata Kunci : Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

A. LATAR BELAKANG

Bila kualitas pendidikan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia maka peringkat Indonesia diantara negara-negara Asean, sampai dengan tahun 2001, menempati peringkat 102, di bawah Vietnam dan di atas Myanmar. Angka indeks ini digunakan oleh Unesco dan World Bank dalam memeringkat pembangunan manusia di dunia. Peringkat selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. PERINGKAT IPM, IKM, IPT DAN IDS INDONESIA DI ANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN

NEGARA	IPM	IKM	IPT	IDS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Singapura	26	--	10	2
Malaysia	56	13	30	29
Thailand	66	21	40	38
Filipina	70	23	44	40
Vietnam	101	45	--	--
Indonesia	102	38	60	49
Myanmar	118	43	--	--

Keterangan: IPM= Indeks Pembangunan Manusia; IKM= Indeks kemiskinan Manusia; IPT= Indeks Pencapaian Teknologi; dan IDS= Indeks Daya Saing.

Sumber: Human Development Report, 2001 dan World Competitiveness Year Book 2001

Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA 1990 -1999

INDIKATOR	1990	1996	1999
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup (th)	63,2	66,4	66,2
Angka kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	56,0	44,0	44,9
Angka Melek Huruf (5)	81,5	85,5	88,4
Rata-rata lama sekolah (th)	5,3	6,3	6,7
Tingkat Konsumsi per Kapita (Rp.000)	555,4	587,4	578,8
Indeks Pembangunan Manusia	63,4	67,7	64,3

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1999.

Apabila IPM ini digunakan, maka rendahnya kualitas pendidikan di Jawa Barat dapat ditunjukkan oleh rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat bila dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia. Berdasarkan data yang bersumber dari Biro Pusat Statistik, pada tahun 1999 Propinsi Jawa Barat berada pada ranking 15 dari 26 propinsi lain yang ada di Indonesia, dengan nilai IPM sebesar 64,6. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi IPM Jawa Barat pada tahun 1999 antara lain Angka Melek Huruf (91,77 %), Rata-rata Lama Sekolah (6,85 tahun), Angka Harapan Hidup (65,43 tahun) dan Tingkat Konsumsi Perkapita (Rp 606,2/jiwa). Menurut Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat 2001-2005, ada enam daerah di Jawa Barat yang memberikan kontribusi negatif terhadap rendahnya kualitas IPM. Keenam Kabupaten tersebut beserta nilai IPM nya dapat dilihat pada Tabel 3.

DATA ENAM KABUPATEN DI JABAR DENGAN IPM TERENDAH

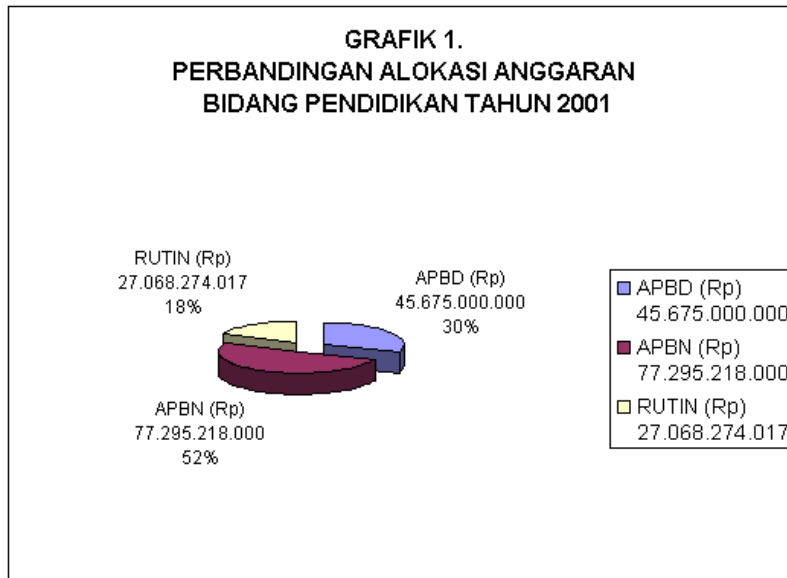
KABUPATEN	IPM
INDRAMAYU	56,5
KARAWANG	60,4
GARUT	61,7
CIREBON	61,6
MAJALENGKA	62,8
SUBANG	63,1
JAWA BARAT	64,6

Menurut sumber yang sama, rendahnya kualitas pendidikan di Jawa Barat tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa kondisi lingkungan di Jawa Barat yang sangat tidak mendukung bagi pembangunan pendidikan di Jawa Barat saat ini , yaitu:

1. SARANA DAN PRASARANA YANG MEMPRIHATINKAN
2. KEKURANGAN DAYA TAMPUNG
3. KEKURANGAN TENAGA GURU
4. RENDAHNYA KESEJAHTERAAN GURU
5. RENDAHNYA KUALITAS GURU
6. RENDAHNYA ANGGARAN PENDIDIKAN
7. RENDAHNYA KUALITAS MANAJEMEN SEKOLAH
8. ANGKA DROP OUT (DO) YANG MENGANCAM

Kondisi lingkungan pendidikan di Jawa barat seperti itu nampaknya yang menjadi penyebab selalu mundurnya pencapaian sasaran program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (wajar dikdas 9 tahun) yang mulai tahun 1994 telah dicanangkan. Indikator yang dapat menjelaskan ini yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP di Jawa Barat pada tahun 2001 baru mencapai 72,32 % dan 56,02 %. Sehingga Pemerintah perlu menargetkan kembali tuntas wajar dikdas 9 tahun akan dicapai tahun 2008/2009 yang akan datang, dan untuk Jawa Barat Pemerintah Propinsi Jawa Barat menargetkan 2 tahun lebih cepat yaitu tahun 2006 yang akan datang.

Pada tahun 2001, besarnya Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan seluruh program pembangunan bidang pendidikan yang dikelola Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat adalah sebesar adalah Rp 45.675.000.000,-. Seluruh anggaran ini digunakan untuk membiayai 25 jenis proyek APBD. Besarnya anggaran ini memang lebih masih kecil bila dibandingkan dengan besarnya anggaran pembangunan bidang pendidikan yang bersumber dari APBN tahun 2001, yaitu sebesar Rp 77.295.218.440. Perbandingan alokasi anggaran bidang pendidikan tahun 2001, baik untuk APBD, APBN dan program rutin dapat dilihat pada Grafik 1.



Dilihat dari alokasinya, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung (Republika, 17 Mei 2003) lebih banyak untuk belanja pegawai, diikuti untuk rehabilitasi gedung.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu ada reorientasi dan penyikapan tertentu terhadap kebijakan pendidikan, baik dari pemegang kebijakan maupun dari masyarakat.

Semua pihak harus melihat, bahwa pendidikan bukan untuk konsumsi melainkan untuk investasi yang kembaliannya akan terasa dalam jangka panjang. Dalam hal ini, terasa pada pertumbuhan ekonomi masa mendatang.

9. PENDIDIKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Mungkinkah ada intervensi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi?

Pendidikan memiliki daya dukung yang representatif atas pertumbuhan ekonomi. Tyler mengungkapkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang, yang kemudia akanmeningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara yang bersangkutan, untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu Jones melihat pendidikan sebagai alat untuk menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jones melihat, bahwa pendidikan memiliki suatu kemampuan untuk menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja potensial, dan menjadi lebih siap latih dalam pekerjaannya yang akan memacu tingkat produktivitas tenaga kerja, yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan nasional. Menurutnya, korelasi antara pendidikan dengan pendapatan tampak lebih signifikan di negara yang sedang membangun.

Sementara itu Vaizey melihat pendidikan menjadi sumber utama bakat-bakat terampil dan terlatih. Pendidikan memegang peran penting dalam penyediaan tenaga kerja. Ini harus menjadi dasar untuk perencanaan pendidikan, karena pranata ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih. Permasalahan yang dihadapi adalah jarang ada ekuivalensi yang kuat antara pekerjaan dan pendidikan yang dibutuhkan yang mengakibatkan munculnya pengangguran terdidik dan terlatih. Oleh karena itu, pendidikan perlu mengantisipasi kebutuhan. Ia harus mampu memprediksi dan mengantisipasi kualifikasi pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja. Prediksi ketenagakerjaan sebagai dasar dalam perencanaan pendidikan harus mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada kaitannya dengan kebijaksanaan sosial ekonomi dari pemerintah.

Intervensi pendidikan terhadap ekonomi merupakan upaya penyiapan pelaku-pelaku ekonomi dalam melaksanakan fungsi-fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi. Intervensi terhadap fungsi produksi berupa penyediaan tenaga kerja untuk berbagai tingkatan yaitu top, middle, dan low management; atau secara ekstrim tenaga kerja krah biru dan krah putih. Di samping tenaga kerja, juga pendidikan mengintervensi produksi untuk penyediaan entrepreneur tangguh yang mampu mengambil resiko dalam inovasi teknologi produksi. Bentuk intervensi lain yaitu menciptakan teknologi baru dan menyiapkan orang-orang yang menggunakannya. Program-program perluasan produksi melalui intensifikasi dan rasionalisasi merupakan salah satu wujud nyata dari peran prangata pendidikan atas fungsi produksi ini. Intervensi terhadap fungsi distribusi adalah melalui pengembangan *research and development* produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat atau konsumen. Intervensi terhadap fungsi konsumsi dilakukan melalui peningkatan produktivitas kerja yang akan mendorong peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini akan mendorong pada peningkatan fungsi konsumsi, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah tabungan yang berasal dari pendapatan yang disisihkan. Tabungan ini akan menjadi investasi kapital yang tentunya akan lebih mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara.

10. UKURAN-UKURAN KONTRIBUSI PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Bagaimanakah keterkaitan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi? Secara sederhana, jawaban atas pertanyaan tersebut dapat digambarkan di halaman berikut.

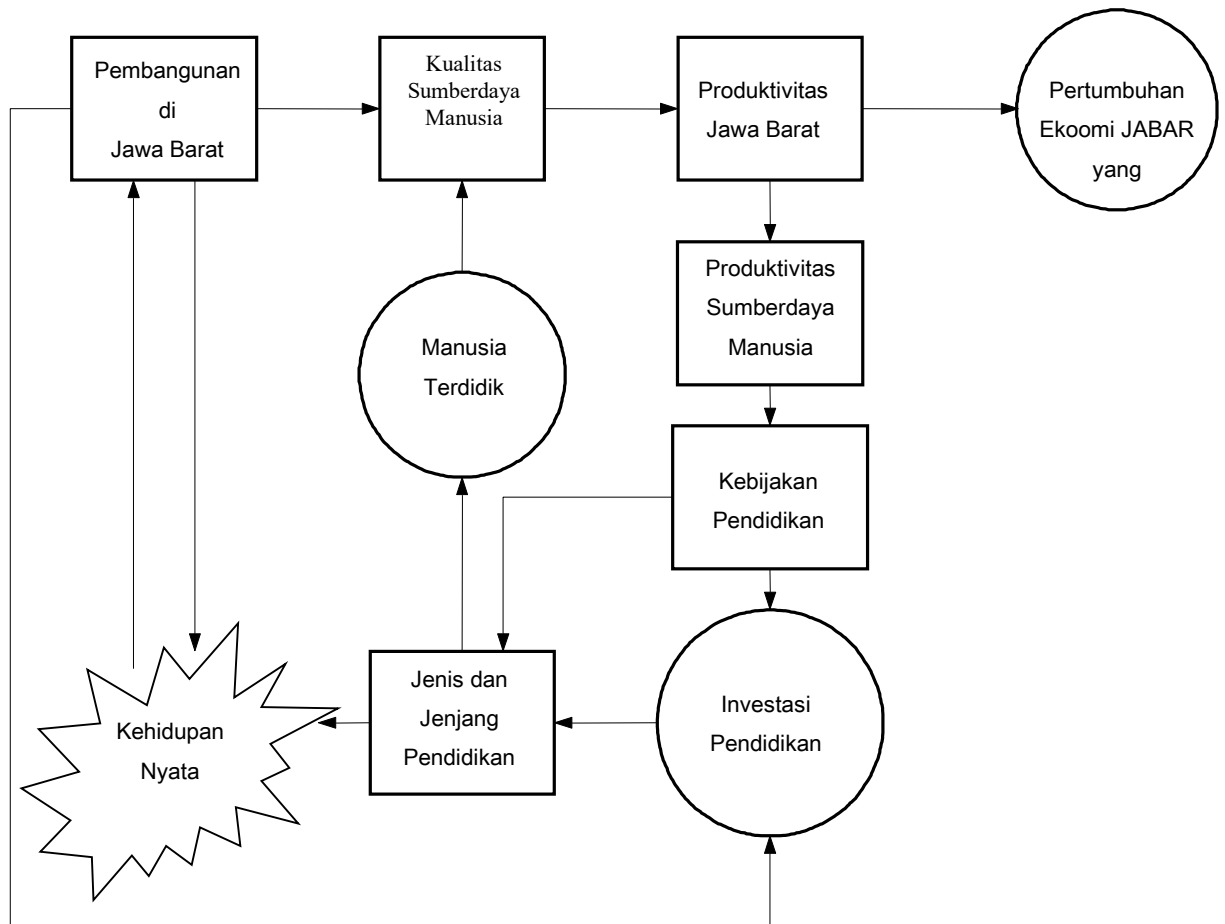
Untuk menjawab hal tersebut di atas, kita tidak dapat melepaskan diri dari masalah pembangunan. Konsep pembangunan dalam bidang sosial ekonomi sangat beragam tergantung konteks penggunaannya. Ahli-ahli ekonomi mengembangkan teori pembangunan yang didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal dengan istilah *Investment in Human Capital*. Teori ini didasari pertimbangan bahwa cara

yang paling efisien dalam melakukan pembangunan nasional suatu negara terletak pada peningkatan kemampuan masyarakatnya. Selain itu dihipotesiskan pula bahwa faktor utama yang mendukung pembangunan adalah pendidikan masyarakat.

Teori human capital mengasumsikan bahwa pendidikan formal merupakan instrumen terpenting untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki produktifitas yang tinggi. Menurut teori ini pertumbuhan dan pembangunan memiliki 2 syarat, yaitu

Adanya pemanfaatan teknologi tinggi secara efisien, dan Adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Sumber daya manusia seperti itu dihasilkan melalui proses pendidikan.

Hal inilah yang menyebabkan teori human capital percaya bahwa investasi dalam pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.



Asumsi dasar yang melandasi keharusan adanya hubungan pendidikan dengan penyiapan tenaga kerja adalah bahwa pendidikan diselenggarakan untuk

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk bekerja. Dengan kata lain, pendidikan menyiapkan tenaga-tenaga yang siap bekerja. Namun demikian pada kenyataannya tingkat pengangguran di hampir seluruh negara bertambah sekitar 2 % setiap tahunnya (World Bank:1980)

Terjadinya pengangguran bukan disebabkan tidak berhasilnya proses pendidikan, namun pendidikan tidak selalu harus menghasilkan lulusan dengan jenis pekerjaan tertentu. Sekolah memang dapat menghasilkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, tetapi sekolah bukan satu-satunya tempat dimana keterampilan itu dapat dicapai.

Terdapat berbagai macam faktor untuk mengukur bagaimana pertumbuhan ekonomi diukur dengan baik. Diantara ukuran-ukuran tersebut, diantaranya:

11. Pendapatan per-kapita
12. Perubahan peta ketenagakerjaan dari pertanian ke industri
13. Konsumsi energi atau pemakaian barang berteknologi tinggi seperti mobil, telepon, televisi

Dengan demikian kriteria untuk menilai keberhasilan pembangunan:

14. Peningkatan dalam efisiensi sistem produksi masyarakat yang diukur dengan GDP dan GNP.
15. Kepuasan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,
16. Pencapaian tujuan-tujuan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat, yang dikaitkan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas.

Pola keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan berbeda sesuai dengan karakteristik khas setiap negara. Secara ringkas tampak berikut ini.

17. Negara Kapitalis vs Negara Sosialis. Ekonomi di negara kapitalis mengasumsikan bahwa model produksinya bebas dari intervensi pemerintah dan mensyaratkan adanya kompetisi terbuka di dalam pemasaran. Hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sangat erat dan pendidikan merupakan suatu hal yang diperlukan. Ekonomi di negara sosialis, memiliki konteks yang berbeda dalam mengiteprekasikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pemerintah memiliki peranan di dalam mengontrol jalannya proses produksi dan pemasaran. Kaitan antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan seolah tidak terlihat karena pembangunan sangat diatur oleh negara, bukan ditentukan oleh masing-masing warga negara.
18. Negara Industri vs Non-Industri. Di Amerika Serikat yang sudah maju, persentase pekerja yang bekerja di sektor industri sebesar 33 % dan di bidang jasa/service sebesar 66 %. Di Meksiko persentase di sektor yang sama

adalah 23 % dan 33 %. Di negara maju, penduduknya memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi, pemakaian teknologi yang canggih, konsumsi energi yang lebih besar dibandingkan negara kurang berkembang. Di negara maju memiliki akumulasi modal yang lebih besar, sebagai akibat dari kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan konsumsi, sehingga jumlah tabungan semakin lebih besar dan pada akhirnya akan diinvestasikan lagi pada sistem ekonomi yang telah berjalan. Hubungan antara pendidikan dan pembangunan di negara maju sangat jelas dilihat dari adanya perubahan karakteristik individu yang berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Di negara non-industri, perekonomiannya sangat tergantung kepada sektor pertanian sehingga persentase tenaga kerjanya lebih banyak yang bekerja di sektor non-industri.

Jelas bagaimana pentingnya analisis kontribusi pendidikan dalam pembangunan. Salah satu alasan banyaknya kontroversi tentang kaitan antara pembangunan dan pendidikan disebabkan karena sedikit sekali kebijakan pendidikan yang dimonitor benar-benar dan juga dievaluasi hasilnya. Analisis terhadap pendidikan biasanya bersifat *ex-post facto*, artinya data diperoleh dari kejadian-kejadian yang telah lampau. Sebenarnya konsep bagaimana pendidikan itu harus dievaluasi harus dikembangkan sejak tujuannya ditetapkan. dengan memperhatikan kerangka berpikirnya dan metodologinya. Metode yang sering dipakai dalam penelitian evaluasi adalah *linear regression and the educational production*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk membicarakan lebih lanjut kontribusi pendidikan terhadap pembangunan harus ditemukan kriteria-kriteria atau ukuran-ukuran pertumbuhan atau hasil pembangunan. Dari uraian di atas, maka dapatlah dirumuskan ukuran-ukuran sebagai berikut.

19. Teknologi tinggi dan sumberdaya yang mengoperasikannya
20. Pendapatan per-kapita
21. Perubahan peta ketenagakerjaan dari pertanian ke industri
22. Konsumsi energi atau pemakaian barang berteknologi tinggi
23. Peningkatan dalam efisiensi sistem produksi masyarakat yang diukur dengan GDP dan GNP
24. Kepuasan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
25. Pencapaian tujuan-tujuan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat, yang dikaitkan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.

Berdasarkan ukuran tersebut di atas, maka untuk mengetahui keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan diperlukan data sebagai berikut.

26. Pendidikan, yang meliputi partisipasi pendidikan untuk setiap jenis dan

jenjang pendidikan

27. Pendapatan nasional, baik dalam bentuk Pendapatan Nasional Bruto, Pendapatan Domestik Bruto, maupun Pendapatan Perkapita
28. Perubahan peta ketenagakerjaan, dengan rentangan pertanian-jasa-industri
29. Konsumsi energi

30. PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN

Ukuran yang paling populer dalam melihat kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah mempertautkan antara pendidikan dengan pekerjaan. Pemikiran ini didasarkan pada anggapan bahwa pendidikan merupakan *human capital*. Pemikiran ini muncul pada era industrialisasi dalam masyarakat modern. Argumen ini memiliki dua sepek, yaitu:

31. Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi modern, dan
32. Investasi pendidikan diharapkan menghasilkan suatu peningkatan kesejahteraan dan kesempatan yang lebih luas dalam kehidupan nyata.

Sebagai ilustrasi, meningkatkan tingkat pendidikan pekerja berpenghasilan rendah akan memberikan tiga pengaruh positif, yaitu:

33. Meningkatkan produktivitas kerja dan konsekuensinya terhadap pendapatan
34. Meningkatkan suplai tenaga kerja dengan keahlian tinggi dan konsekuensinya terhadap rendahnya gaji mereka, dan
35. Menciptakan kekurangan pekerja berkeahlian rendah dengan konsekuensi meningkatkan gaji pekerja golongan ini.

36. PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, perlu dilakukan reposisi atas kebijakan pendidikan di Jawa Barat, dengan memandang bahwa pendidikan merupakan investasi yang memiliki nilai-nilai ekonomis tertentu, meskipun dapat dirasakan pada masa jangka panjang. Dengan memandang pendidikan sebagai suatu investasi, perlu dilakukan evaluasi ekonomis untuk proyek-proyek investasi pendidikan dengan kriteria berikut:

37. *Return to investment* yang bernilai ekonomis langsung, dalam hal

keseimbangan antara *opportunity cost* dari sumberdaya yang digunakan dan keuntungan di waktu mendatang yang diukur oleh meningkatnya produktivitas pekerja yang terdidik.

38. *Return* yang bernilai ekonomi tidak langsung, dalam hal keuntungan eksternal yang mempengaruhi penghasilan anggota masyarakat lain.
39. Keuntungan fiskal dalam bentuk pajak yang lebih tinggi yang dibayarkan sebagai akibat dari penghasilan yang meningkat.
40. Pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja terampil, yang tercermin dalam pola pembayaran, praktek perekrutan, dan indikator-indikator lain penggunaan tenaga kerja.
41. Kebutuhan pribadi akan pendidikan (dilihat dari *rate of return* pribadi terhadap investasi pendidikan, besar-kecilnya iuran sekolah, dan biaya pribadi lainnya) dan faktor-faktor sosial dan lainnya yang menentukan kebutuhan individu akan pendidikan.
42. Efisiensi internal lembaga-lembaga pendidikan, dalam kaitan antara input dan output, yang diukur oleh tingkat keborosan dan pengurangan, dan indikator-indikator *cost-effectiveness* lainnya.
43. Distribusi kesempatan pendidikan secara geografis dan sosial.
44. Distribusi keuntungan pendidikan secara finansial dan beban finansial
45. Efek distribusi kesempatan pendidikan pada distribusi penghasilan dan kontribusi pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan.
46. Kaitan antara investasi pendidikan dan investasii dalam sektor lain, termasuk pengembangan kesehatan dan pertanian.

Konsekuensi dari reposisi di atas, memposisikan pendidikan sebagai suatu investasi jangka panjang, perlu disusun, perlu ditetapkan dan disosilasikan Standar Pelayanan Minimum pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan di Jawa Barat, yang mencakup aspek-aspek:

47. Equity, Efficiency, Partisipasi, Kualitas dan Sustainability

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaro, Jerome S., 1995, *Quality in Education: an Implementation Handbook*, St. Lucie Press, Delray Beach, Florida
- Domingo, Rene T., 1997, *Quality means survival: Caveat venditor, let the seller beware*, Prentice Hall: Simon & Schuster (Asia) Pte Ltd., Singapore
- Kaplan, Robert S., Norton, David P., 1996, *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts
- Kells, H.R., 1992, *Self-Regulation in Higher Education: A Multi-National Perspective on Collaborative Systems of Quality Assurance and Control*, Jessica Kingsley Publishers, London, Philadelphia
- Kotter, John P., Heskett, James L., 1992, *Corporate Culture and Performance*, The Free Press, A Division of Macmillan, Inc., New York
- Macaulay, Steve., Cook, Sarah, 1993, *How to Improve your Customer Service*
- Manajemen, No. 113, September-Oktober, 1997
- Peppard, Joe., Rowland, Philip, 1995, *The Essence of Business Process Re-engineering*, Prentice Hall International (UK) Limited, London
- Schniederjans, Marc. J., 1993, *Topics in Just-In-Time Management*, Allyn & Bacon A Division of Simon & Schuster, Inc., Massachusetts, London
- Vincent Gaspersz, 1997, *Konsep VINCENT: Penerapan Konsep VINCENT tentang Kualitas dalam Manajemen Bisnis Total*, Yayasan Indoensia Emas dan PT Gramedia Pustaka Utama